2025
LAPORAN TRIWULAN I

BADAN PANGAN NASIONAL

BADAN PANGAN NASIONAL
JAKARTA, APRIL 2025

KATA PENGATAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Triwulan I Tahun 2025 Badan Pangan Nasional. Laporan ini sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Triwulan ini disusun dalam rangka melakukan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Badan Pangan Nasional. Selain itu, lapaoran ini disusun untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel untuk terselenggaranya good governance dan clean government.

Laporan Triwulan I Badan Pangan Nasional ini berisikan Capaian Atas Indikator Kinerja Utama Badan Pangan Nasional sebagaimana tercantun dalam rancangan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Pencapaian pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dan berkala dengan membandingkatan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Kami sadari, bahwa laporan ini belumlah sempurna, untuk itu kami harapkan kritik dan masukan yang membangun untuk penyempurnaan laporan kedepan. Semoga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, April 2025
Plt. Sekretaris Utama,

Sarwo Edhy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR LAMPIRAN iv
IKHTISAR EKSEKUTIF vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 1
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1
1.4. Organisasi dan Tata Kerja 2
1.5. Maksud dan Tujuan 3
1.6. Metodologi Pengukuran Kinerja 3
1.7. Sistematika Laporan 3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 5
2.1. Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 5
2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pangan Nasional 5
2.1.2. Tujuan Badan Pangan Nasional 6
2.1.3. Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional 6
2.2. Rencana Kinerja Tahuna 2025 8
2.3. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 11
3.1. Pengelolaan Kinerja 11
3.2. Realisasi Indikator Kinerja 12
3.2.1. Inflagi Harga Bergejoak 14
3.2.2. Penaganan Kerawanan Pangan Indikator (Penanganan Kerawanan Pangan (Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES) 17
3.2.3. Skor PPH Konsumsi 18
3.2.4. Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan, Indikator (Indeks Keamanan Pangan Segar)..... 22
3.2.5 Nilai RB..... 23
3.6. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran 24
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 26
4.1. Kesimpulan 26
4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut 26
LAMPIRAN 27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan , Sasaran Strategis, dan Kinerja Utama.....8
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025.....9
Tabel 3.1 Target dan Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Per Triwulan I Tahun 202512
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional Per 31 Maret Tahun 2025 12
Tabel 3.3 Revisi DIPA Badan Pangan Nasional Tahun 2025.....13

Daftar Gambar

Gambar 2.1. Peta Strategi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 7
Gambar 3.1. Inflasi Harga Bergejolak 15
Gambar 3.2. Realisasi GPM 16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional (DIPA Awal) ……. 27
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional (DIPA I) ……29
Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025. 32
Lampiran 4. Rencana Aksi Penarikan Dana Badan Pangan Nasional Tahun 2025 37

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Triwulan I Tahun 2025 akan menyajikan pencapaian Sasaran Strategis (SS) untuk mendukung pencapaian kinerja tujuan organisasi. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut, Badan Pangan Nasional akan mempertanggungjawabkan 5 (lima) Sasaran Strategis yang telah menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional. Sasaran Strategis tersebut adalah: 1) Terwujudnya ketersediaan dan stabiliasi harga pangan; 2) Meningkatnya akses pangan masyarakat; 3) Meningkatnya kualitas konsumsi pangan; 4) Meningkatnya penjaminan keamanan pangan; 5) Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal. Guna mencapai Sasaran Kinerja yang diharapkan, Badan Pangan Nasional melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara periodik per-triwulan.

Berdasarkan pengukuran kinerja periode Triwulan I Tahun 2025, pada prinsipnya merupakan kinerja yang pengukurannya dilakukan pada akhir tahun. Capaian kinerja Triwulan I disajikan untuk menggambarkan capaian proses pengukurannya mengingat IKU Badan Pangan Nasional Tahun 2025 pencapaiannya sebagian besar diukur diakhir tahun. Pada pengukuran periode triwulan I capaian yang dapat diukur yaitu IKU: Inflasi Harga Bergejolak yang diukur dengan menggunakan metode stabilize, capaiannya sebesar 0,37% dari target 3-5 atau 100%.

Realisasi anggaran Badan Pangan Nasional sampai dengan 31 Maret 2025 sebesar Rp9.950.215.598 atau (6,35%) dari pagu Non Blokir Rp156.732.651.000,- jika dibandingkan terhadap total pagu realisasi sebesar (2,72) dari total anggaran Rp366.382.625.000,-. Rendahnya realisasi anggaran pada periode Triwulan I ini disebabkan dinamika perencanaan program dan anggaran dengan beberapa kali revisi DIPA dalam rangka penyesuaian anggaran dari kebijakan efisiensi, sehingga kegiatan belum dapat berjalan sesuai target.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan Rancangan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, dan dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka pendek sesuai Rencana Kerja (Renja) Badan Pangan Nasional Tahun 2025, dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025. PK Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025 harus dipertanggung jawabkan secara berkala melalui laporan Triwulan dan Tahunan. Penyusunan laporan triwulan ini dilatarbelakangi untuk mengetahui progress serapan anggaran per triwulannya, progress capaian indikator kinerja dan pencapaian Perjanjian Kinerja.

1.2. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional
2. Peraturan MenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Perbadan Nomor 2 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.
5. Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tahun 2025-2029

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
2. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
3. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
4. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyarat an gizi pangan;
5. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
7. pengembangan sistem informasi pangan;
8. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
9. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional;
10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
11. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

1.4. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi unit kerja mandiri lingkup Badan Pangan Nasional terdiri dari:

1. Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional; mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.
2. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan; mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksansaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah mclalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan.
3. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi; mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan.
4. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang bereda.
5. Inspektorat; mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Badan Pangan Nasional.
6. Pusat Data dan lnformasi Pangan; mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan sistem informasi pangan dan sistem pelayanan elektronik, serta pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi.

1.5. Maksud dan Tujuan

Laporan Triwulan I Badan Pangan Nasional Tahun 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional. Adapun tujuan penyusunan laporan triwulan I adalah mengevaluasi capaian kinerja Badan Pangan Nasional sampai periode triwulan I Tahun 2025 sesuai Indikator Kinerja Utama Badan Pangan Nasional.

1.6. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui:

1. Pengukuran atas Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional periode Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU periode Triwulan I Tahun 2025 dengan target keuangan sesuai lembar ke-3 DIPA sampai dengan posisi triwulan I Badan Pangan Nasional sebesar 25%.

1.7. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

Bab I PENDAHULUAN, yang mencakup latar belakang; dasar hukum; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi dan tata kerja; maksud dan tujuan; waktu pengukuran; metodologi pengukuran kinerja

Bab II PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA, mencakup Renstra Badan Pangan Nasional, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA, yang berisi mengenai pengelolaan kinerja Badan Pangan Nasional, Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025, dan Realisasi Rencana Aksi s.d. Triwulan I Tahun 2025.

Bab IV PENUTUP, yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi di Badan Pangan Nasional, dalam proses penetapan Rancangaan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang menjadi dasar bagi unit kerja eselon I dalam melakukan penajaman terkait Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *balance score card* (BSC) di lingkungan Badan Pangan Nasional.

2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan pangan harus mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut diwujudkan dalam 5 sasaran utama, 8 misi (agenda) pembangunan, 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan. Perwujudan ini sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030. Sesuai semangat visi Indonesia Emas 2045, dan juga selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, maka visi Badan Pangan Nasional yakni: “***Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045***”

Yang akan dilaksanakan melalui misi:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan.
3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan.

4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan.
5. Mengoptimalkan pengelolaan sisa pangan.
6. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
7. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
8. Menyelenggarakan bantuan pangan.
9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal.

2.1.2 Tujuan Badan Pangan Nasional yaitu:

Tujuan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pangan Nasional adalah memperkuat tata kelola penyediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terjangkau, merata, beragam, bermutu, dan aman yang diindikasikan dengan indikator tujuan Badan Pangan Nasional yaitu: Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Yang Berasal Dari Produksi Domestik (*self-sufficiency ratio*/SSR). Indikator ini mencerminkan ukuran kemandirian yang menunjukkan sejauh mana negara dapat menyediakan pangan untuk memenuhi permintaan domestiknya. Hal ini selaras dengan prioritas utama Pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan di tanah air, utamanya untuk komoditas beras, jagung dan gula. Angka SSR ditargetkan > 90% dengan harapan Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pangan, dengan produksi pangan domestik mendekati, atau bahkan melebihi kebutuhan konsumsinya. Hal ini berarti pemenuhan kebutuhan pangan tidak bergantung pada impor.

2.1.3 Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional

Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan target kinerja yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pangan pada periode sebelumnya, isu strategis saat ini dan perkiraan ke depan, serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Badan Pangan Nasional telah menentukan Sasaran Strategis Tahun 2025-2029 dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholder, customer, internal process* dan *learning and growth perspective*.

Gambar 2.1 Peta Strategi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang akan dicapai dalam periode Tahun 2025-2029 adalah:

a. SS1. Terwujudnya Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 1 yaitu Inflasi Harga Bergejolak.
b. SS2. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 2 yaitu Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES).
c. SS3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 3: Skor PPH konsumsi.
d. SS4. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 4: Indeks Keamanan Pangan Segar.
e. SS5. Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal, yang diukur melalui capaian IKSS 5: Nilai Reformasi Birokrasi (RB).

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama

Visi	Misi	Tujuan	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama)
Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan 2. Memperkuat logistik dan distribusi pangan 3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan 4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan 5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan 6. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang 7. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar 8. Menyelenggarakan bantuan pangan 9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal	Memperkuat tata kelola penyediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terjangkau, merata, beragam, bermutu, dan aman	Indikator Tujuan Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik)	1. Terwujudnya Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan	IKSS 1 Inflasi Harga Bergejolak.
				2. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan	IKSS2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / *Food Insecurity Experience Scale (FIES)*
				3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan	IKSS 3 Skor PPH Konsumsi
				4. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan	IKSS 4 Indeks Keamanan Pangan Segar
				5. Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal	IKSS 5 Nilai RB

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025, telah ditetapkan target untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sebagaimana pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya ketersediaan dan stabiliasi harga pangan	Inflasi Harga Bergejolak	%	3-5
2	Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)	%	3,75
3	Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Skor PPH Konsumsi	Skor	94
4	Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan	Indeks Keamanan Pangan Segar	Indeks	61
5	Nilai RB	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai	81

Pada Tahun 2025 terdapat perubahan PK Kepala Badan Pangan Nasional yaitu pada point 1 (satu) semula inflasi harga pangan bergejolak, dan point 2 (dua) Indeks Keamanan Pangan Segar merupakan PK baru yang dicascading langsung dari RPJMN 2025-2029..

2.3. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Badan Pangan Nasional telah menyusun Rencana Aksi Kinerja berdasarkan penetapan kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana aksi kinerja ini memberikan informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya rencana aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan

kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan dengan penjenjangan kinerja sebagaimana lampiran 3.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengelolaan Kinerja

Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025 menggunakan sasaran strategis dan indikator dalam Rancangan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sbb:

1. Sangat Berhasil : Jika capaian kinerja > 90 %
2. Berhasil : > 80% - 90%
3. Cukup Berhasil : > 60% - 80%
4. Kurang Berhasil : > 50% - 60%
5. Sangat Kurang Berhasil : ≤ 50 %

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu *maximize target*, *minimize target* dan *stabilize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Untuk *minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka semakin baik kinerjanya. Sedangkan prinsip *stabilize target* adalah stabilitas, dimana semakin stabil angka realisasi kinerja dan mendekati titik stabil target, maka semakin baik kinerja yang dicapai. Adapun Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Badan Pangan Nasional untuk *maximize, minimize* dan *stabilize* sebagai berikut :

Maximize target : $\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Minimize target : $\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}\right)\right] \times 100\%$

Stabilize target : $\text{Indeks Capaian IKU} = \left(1 - \left[\ \frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}}\ \right]\right)\ \times 100\%$

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya.

3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Pencapaian kinerja tujuan organisasi merupakan hasil dari akumulasi pencapaian kinerja sasaran strategis. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pangan Nasional. Capaian Indikatoor Kinerja Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sebagai tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Baseline		Target				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Memperkuat tata kelola penyediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terjangkau, merata, beragam, bermutu, dan aman	Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik))	%	NA	86,00	88,82	87,64	88,99	90,29	91,03

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis		**Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)**	**Satuan**	**Baseline**		**Target**				
				2023	**2024 (rencana)**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Terwujudnya ketersediaan dan stabiliasi harga pangan	Inflasi Harga Bergejolak	%	6,73	0,12	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
2	Meningkatnya akses pangan masyarakat	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / *Food Insecurity*	%	4,5	4,02	3,75	3,6	3,5	3,42	3,36

		Experience Scale (FIES)								
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH konsumsi	skor	94,1	93,5	94	94,5	95	95,5	96
4	Meningkatnya penjaminan keamanan pangan	Indeks keamanan pangan segar	%	na	60	61	62	63	64	65
5	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	Nilai	na	na	82	84	86	88	90

Sumber: Badan Pangan Nasional, diolah (2024)

Capaian kinerja Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis (SS) periode Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Target dan Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Per Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Persentase
				Tahunan	Realisasi	
1	Terwujudnya ketersediaan dan stabiliasi harga pangan	Inflasi Harga Bergejolak	%	3-5	0,37	100
2	Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)	%	3,75	Tahunan	-
3	Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Skor PPH Konsumsi	Skor	94	Tahunan	-
4	Pengendalian Penyakit Asal	Indeks Keamanan	Indeks	61	Tahunan	-

	Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan	Pangan Segar				
5	Nilai RB	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai	81	Tahunan	-

Dari tabel di atas gambaran Sasaran Strategis, target IKU dan capaian IKU Badan Pangan Nasional sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

3.2.1. SS. Terwujudnya Ketersediaan dan Stabiliasi Harga Pangan

Indikator: Inflasi Harga Bergejolak

- Pada bulan Maret Tahun 2025 perkembangan angka inflasi *year on year* (*y-on-y*) sebesar 1,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,22. Inflasi provinsi *y-on-y* tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 8,05 persen dengan IHK sebesar 115,26 dan terendah terjadi di Provinsi Papua Barat Daya sebesar 0,24 persen dengan IHK sebesar 104,07. Deflasi provinsi *y-on-y* terdalam terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 0,23 persen dengan IHK sebesar 106,37 dan terendah terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar 0,22 persen dengan IHK sebesar 106,07. Sementara inflasi kabupaten/kota *y-on-y* tertinggi terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 8,05 persen dengan IHK sebesar 115,26 dan terendah terjadi di Kota Tanjung Pinang sebesar 0,07 persen dengan IHK sebesar 105,05. Deflasi kabupaten/kota *y-on-y* terdalam terjadi di Kabupaten Muko Muko sebesar 0,83 persen dengan IHK sebesar 105,61 dan terendah terjadi di Kota Bengkulu sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 106,23.
- Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,07 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,41 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan

pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,95 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,80 persen; kelompok transportasi sebesar 0,83 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,89 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,26 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,71 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 4,68 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,24 persen.

- Tingkat inflasi *month to month* (*m-to-m*) bulan Maret tahun 2025 sebesar 1,65 persen dan tingkat inflasi *year to date* (*y-to-d*) bulan Maret tahun 2025 sebesar 0,39 persen.
- Tingkat inflasi *y-on-y* komponen inti Maret 2025 sebesar 2,48 persen, inflasi *m-to-m* sebesar 0,24 persen, dan inflasi *y-to-d* sebesar 0,79 persen.

Gambar 3.1. Inflasi Harga Bergejolak, sumber BPS.

Kontribusi Badan Pangan Nasional dalam menjaga inflasi harga bergejolak melakukan berbagai koordinasi dan kegiatan Gerakan Pasar Murah (GPM) diseluruh Indonesia untuk menjaga inflasi harga pangan bergejolak, bekerjasasma

dengan Dinas yang menangani Ketahanan Pangan di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan bekerjasama dengan Bulog, Id-food dan mitra lainnya yang mendukung pelaksanaan GPM. Capaian inflasi harga bergejolak pada Triwulan I bulan Maret tahun 2025 sebesar **0,37%** dari target 3-5 atau mencapai 100 %

Gambar 3.2. Realisasi Pelaksanaan GPM Nasional sampai dengan Maret 2025.

Komoditas pangan pada kegiatan SPHP GPM adalah komoditas pembentuk inflasi (*volatile foods*) antara lain beras, gula konsumsi, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, dan minyak goreng yang dapat disediakan oleh Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, distributor, dan petani/peternak/poktan/gapoktan. Sedangkan komoditas lainnya seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan petani/peternak/ poktan/gapoktan.

Pelaksanaan GPM bulan Januari-Maret tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 2.635 kali pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut: Pusat sebanyak 46 kali, provinsi sebanyak 418 kali di 31 provinsi dan 2717 kali di 421 kabupaten/Kota, baik menggunakan anggaran APBN Pusat, Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri.

Perhitunagn capaian inflasi harga bergejolak

A. Jika di bawah 3%

$$Capaian\ Inflasi\ Harga\ Bergejolak\ (Vi) = \left(1 - \frac{3 - Vi}{3}\right) x100\%$$

B. Jika di 3% ≤ Vi ≤ 5% maka capaian 100%

C. Jika di atas 5%

$$Capaian\ Inflasi\ Harga\ Bergejolak\ (Vi) = \left(1 - \frac{Vi - 5}{5}\right) x100\%$$

catatan:

Perlu pendalaman lebih lanjut, karena skala capaian akan berbeda jika di bawa 3% dan di atas 4%. Misalnya jika inflasi Vi 2,5% maka capaian 83.3%, sedangkan jika capaian Inflasi Vi 5,5% maka capaian sebesar 90%, nilai capain berbeda padahal selisih dari target sama-sama 0,5%. Alternatif nilai pembagi untuk target disamakan menjadi nilai tengah/median yaitu 4%.

3.2.2. SS. Penaganan Kerawanan Pangan Indikator (Penanganan Kerawanan Pangan (Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)

FIES menggunakan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengungkap bagaimana individu mengalami kesulitan dalam mengakses makanan. Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup berbagai aspek, seperti kekhawatiran tentang tidak cukup makanan, kesulitan membeli makanan, dan pengalaman makan dengan kualitas yang kurang memadai. Skala FIES telah digunakan secara luas di berbagai negara untuk mengidentifikasi kelompok yang rentan terhadap kerawanan pangan dan untuk memandu kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Capaian indikator ini pengukurannya dilakukan di akhir tahun berdasarkan hasil release oleh Badan Pusat Statistik.

Indikator FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) tahun 2024 hasil rilis BPS sebesar 4,02% dari target 4,20%.

Untuk mencapai Indikator ini tidak bisa dilakukan oleh Badan Pangan Nasional sendiri melainkan melibatkan berbagai Kementeria/Lembaga terkait. Peran Badan

Pangan Nasional untuk mendukung capain ini adalah dengan melakukan intervensi program/kegiatan dalam bentuk bantuan pangan yang langsung diberikan kepada masyarakat miskin.

3.2.3. SS. Penganekaragaman Konsumsi Pangan Indikator (Skor PPH Konsumsi)

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi menjadi indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat. Pengukuran indikator ini dilakukan pada akhir tahun dengan menggunakan sumber data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret yang dilaksanakan Badan Pusat Statitik (BPS).

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat melalui indikator Skor PPH dilakukan melalui implementasi kebijakan pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Adapun strategi kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode Triwulan I Tahun 2025 untuk mencapai tujuan tersebut meliputi : (1) promosi pola konsumsi pangan B2SA, (2) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat melalui Rumah Pangan B2SA, Desa B2SA DAK Non Fisik, penguatan database konsumsi pangan; penyusunan Petunjuk Teknis; serta koordinasi tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

1. **Penyusunan dan sosialisasi petunjuk teknis**

   Penyusunan Petunjuk Teknis Rumah Pangan B2SA Tahun 20025 telah dilakukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA di daerah. Sosialisasi Petunjuk Teknis Rumah Pangan B2SA pada Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi juga telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2025 melalui zoom meeting. Sosialisasi di hadiri oleh 17 Provinsi penerima manfaat kegiatan Rumah Pangan B2SA tahun 2025.

2. **Promosi Pola Konsumsi Pangan B2SA**

   Telah dilakukan edukasi dan promosi konsumsi pangan B2SA melalui kegiatan B2SA Goes To School (BGtS) dan sosialisasi / kampanye konsumsi Pangan B2SA. Kegiatan BGTS merupakan kegiatan sosialisasi dan edukasi pola

konsumsi pangan B2SA kepada anak sekolah untuk menambah pengetahuan serta memberikan contoh bagaimana mengonsumsi makanan yang B2SA melalui kegiatan pemberian makanan B2SA. Kegiatan BGtS selama Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan di Universitas Galuh Ciamis pada 20 Januari 2025 dengan jumlah peserta sekitar 150 mahasiswa. Pada bulan Februari dilaksanakan di dua sekolah yaitu SMA N 1 Cikarang dengan peserta sebanyak 200 siswa , dan Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 sebanyak 300 santri. Pada bulan Maret BGtS dilaksanakan di 3 sekolah yaitu SDN Kayu Putih 08 Pagi Jakarta Timur dengan jumlah peserta 260 siswa, SD IT insan Rabbani Bekasi, dan SMA Labschool Kebayoran Jakarta.

Sosialisasi/Kampanye juga dilakukan kepada kelompok masyarakat untuk mempromosikan pentingnya konsumsi pangan B2SA. Kampanye dilakukan dengan mengedukasi masyarakat serta membagikan menu makan B2SA. Beberapa kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi B2SA pada tahun 2025, diantaranya Sosialisasi B2SA Balai Desa Bendungan Kec.Lebakwangi Kab.Kuningan dengan peserta Ibu PKK. Anak TK dan SD. Pada bulan Februari juga dilakukan sosialisasi B2SA pada Festival Ketahanan Pangan KKN PPM 42 UNPAD di Ruang Musyawarah Balai Desa Jatiendah dengan peserta masyarakat desa. Pada bulan Maret bertepatan bulan ramadhan, dilaksanakan sosialisasi B2SA di Masjid Istiqlal dengan peserta jamaah masjid.

3. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat melalui Rumah Pangan B2SA

Rumah Pangan B2SA merupakan tempat dilaksanakannya sosialisasi, edukasi, dan implementasi konsumsi Pangan B2SA berbasis pada potensi sumber daya lokal. Kegiatan Rumah Pangan B2SA meliputi sosialisasi pola konsumsi Pangan B2SA, fasilitasi pengolahan Pangan dan bimtek pengolahan Pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Pelaksana kegiatan Rumah Pangan B2SA adalah Kelompok Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa. Kegiatan Rumah Pangan B2SA tahun 2025 dilaksanakan di 47

Desa/Kelurahan yang tersebar di 13 Provinsi di seluruh Indonesia. Pada tanggal 16 April 2025 dilakukan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Pengembangan Desa B2SA Tahun 2025.

4. Pengembangan Desa B2SA DAK Non Fisik

Pengembangan Desa B2SA merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam satu lokasi desa dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman berbasis potensi lokal. Kegiatan ini mencakup pelatihan pengolahan pangan lokal, pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan rumah tangga, bantuan sarana pengolahan pangan, serta pendampingan teknis dari dinas pangan daerah.

Badan Pangan Nasional menetapkan 809 desa di 50 Kabupaten seluruh Indonesia sebagai sasaran kegiatan Pengembangan Desa B2SA TA 2025. Lokasi desa B2SA diutamakan pada desa/kelurahan rentan rawan pangan (prioritas 1, 2 atau 3) serta desa yang memiliki potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat.

5. Penyusunan Direktori Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota Tahun 2024

Direktori Konsumsi Pangan disusun untuk menyediakan data dan informasi berupa tingkat konsumsi energi dan protein, serta kualitas dan kuantitas konsumsi pangan pada level kabupaten/kota hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2024. Penyusunan Buku Direktori Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota dibagi menjadi 3 buku. Buku I meliputi kabupaten/kota di wilayah Sumatera. Buku II meliputi kabupaten/kota di wilayah Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara. Buku III meliputi kabupaten/kota di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

6. Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Tindak lanjut Perpres 81/2024

Tujuan Rakor adalah konsolidasi tindak lanjut pelaksanaan Perpres 81/ 2024 terkait peran Kemendagri dalam rencana aksi penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal; membahas langkah integrasi penyusunan

RAD pada dokumen keuangan daerah; dan implementasi Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1/2025.

Kementerian dalam negeri sudah membentuk Tim Internal untuk memonitor dan evaluasi daerah dalam menindaklanjuti Perpres 81/2024. Tindak lanjut pertemuan ini : (1) Bapanas akan berkoordinasi dengan Kemenko pangan untuk menyusun Tim Nasional Percepatan Penganekaragaman Pangan; (2) Bapanas beserta Kemendagri akan menyusun petunjuk teknis/panduan penyusunan RAD Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal; (3) Berkoordinasi dengan Bappenas untuk integrasi RAN-PG dengan RAN Penganekaragaman Pangan; (4) Advokasi kepada Kepala Daerah untuk memasukkan penganekaragaman pangan pada dokumen RKPD dan RAPBD; (5) Advokasi kepada Kepala Daerah menyusun regulasi dalam bentuk Perkada atau Perda yang dapat mengikat antara Kepala daerah dengan DPRD.

Indikator kinerja tujuan ini merupakan cascading langsung dari RPJMN Tahun 2025-2029. Skor PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Capaian skor PPH dihitung pada akhir tahun dan melibatkan lintas sector. Capaian skor PPH tahun 2024 93,5 dari target 95,2 atau 98,21%.

Upaya yang dilakukan untuk Mendorong peningkatan PPH tersebut adalah pelaksanaan amanat Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; 2) Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan lintas sektor baik kementerian teknis terkait, perguruan tinggi, swasta/pelaku usaha dan masyarakat umum; serta 3) peningkatan dan optimalisasi dukungan anggaran.

3.2.4. SS. Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan, Indikator (**Indeks Keamanan Pangan Segar**)

Indeks Keamanan Pangan Segar adalah indeks yang merepresentasikan keamanan pangan segar asal tumbuhan, asal ikan dan asal hewan di suatu wilayah, yang dilihat dari beberapa indikator yaitu SDM dan kelembagaan, pelaksanaan penjaminan keamanan pangan, perdagangan, kesehatan masyarakat dan kesadaran konsumen. Pengukuran indikator ini dilakukan pada t+1 dari tahun berjalan dan data pendukung dalam pengukuran indeks ini menggunakan data dari Kementerian Kelautan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Badan Pangan Nasional. Adapun data yang digunakan untuk pengukuran indikator sebagai berikut: 1) indikator SDM dan kelembagaan : ketersediaan regulasi, ketersediaan SDM dan kelembagaan; 2) indikator penjaminan keamanan pangan : persentase sampel yang memenuhi syarat, jumlah sampel, lembaga yang memiliki akses terhadap system Online Single Submission (OSS) dan hasil pengujian dengan rapid test kit; 3) indikator perdagangan: jumlah pangan yang diregistrasi; 4) indikator kesehatan masyarakat : kasus penyakit dan akses terhadap air bersih; dan 5) indikator kesadaran masyarakat : kepemilikan kulkas, kelayakan sanitasi dan pendidikan. Data yang berasal dari Badan Pangan Nasional merupakan kompilasi data baik di pusat maupun di daerah seperti data hasil pengujian keamanan pangan segar. Dinas yang menangani Pangan Daerah akan meng-input data hasil pengujian ke dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT) setelah memperoleh hasil pengujian keamanan pangan, sehingga Badan Pangan Nasional dapat mengakses data hasil pengujian secara berkala.

Indikator ini merupakan cascading langsung dari RPJMN (merupakan indikator baru) yang menjadi perjanjian kinerja Kepala Badan Pangan Nasional. Pencapaian indikator ini periode t+1 dan tidak bisa dilakukan oleh Badan Pangan sendiri namun melibatkan lintas sector terkait. Pengukuran indeks ini menggunakan data dari Kementerian Kelautan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, dan Badan Pangan Nasional).

3.5. Nilai Reformasi Birokrasi (RB)

Penilaian RB Tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) penilaian yaitu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Badan Pangan Nasional, sesuai Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 indikator RB masih mempergunakan evaluasi reformasi birokrasi dengan Indikator PMPRB. Secara mandiri Badan Pangan Nasional akan melakukan penilaian dengan metode perhitungan sesuai PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun 2025, Badan Pangan Nasional juga akan melakukan penilaian dengan menyesuaikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan dilakukan berdasarkan Reformasi Birokrasi (RB) General dan RB Tematik. Nilai RB Tahun 2024 sebesar 66,89 kategori baik dari target 80, sedangkan untuk capaian capain Nilai RB Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dirilis MenpanRB pada t+1.

Upaya Untuk meningkatkan Nlai RB tahun 2025 yaitu,

1. melakukan evaluasi dari capaian 2024,
2. memenuhi dokumen-dokumen yang menjadi aspek penilaian RB
3. Melakukan koordinasi dengan instansi Meso.

3.6. Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional

Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional Per 31 Maret 2025, sebagaimana tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4. Realisasai Anggaran Badan Pangan Nasional per 31 Maret 2025

NO	Unit Kerja	PAGU Rp.	REALISASI Rp.	%
I	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**			
1	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	124.346.419.000	1.362.629.000	1,09
2	Pemantapan Kerawanan Pangan dan Gizi	56.837.000.000	0	0
3	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	68.135.379.000	200.603.578	0,29
II	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	117.063.827.000	8.386.982.740	0,07
TOTAL		**366.382.625.000**	**9.950.215.598**	**2,72**

Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional sampai dengan Triwulan I Rp9.950.215.598 atau (2,72%) dari pagu total Rp366.382.625.000,-. Terdiri dari anggaran Pusat Rp310.243.795.000,- dan Dekonsentrasi Rp56.138.830.000,- Dari pagu tersebut dengan adanya kebijakan efisiensi sebesar Rp160.900.114.000,- maka pagu Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 205.482.511.000,- atau (56,08%). Rendahnya realisasi tersebut, karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Kementerian Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan karena adanya revisi DIPA, sebagaimana tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Revisi DIPA Satker Badan Pangan Nasional smpai dengan Maret 2025.

REVISI DIPA SATKER BADAN PANGAN NASIONALTAHUN 2025

DIPA	Revisi	Uraiantggal Pengesah	Pagu	Pagu		Blokir	Keterangan
		DIPA 2 Desember 20	329.957.285.000	Pusat	Daerah	95.373.792.000	Belum dilengkapi data dukung dan Efisiensi sesuai Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
1	DJA	DIPA 21 Februari 20	329.957.285.000	275.718.455.000	54.238.830.000	160.900.114.000	Pusat dan Daerah: Efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Kementerian Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
2	DJA	DIPA 7 Maret 2025	329.957.285.000	273.818.455.000	56.138.830.000	160.900.114.000	Pusat dan Daerah: Buka Blokir Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi serta pengalokasian Dukungan Manajemen Daerah di 38 Satker sebesar
3	DJA	DIPA 11 Maret 2025	329.957.285.000	273.818.455.000	56.138.830.000	160.900.114.000	Pusat: Revisi dari DJA Penyesuaian Halaman IV DIPA
4	DJA	DIPA 25 Maret 2025	366.382.625.000	310.243.795.000	56.138.830.000	160.900.114.000	Pusat: Tambahan SP SABA 1) Bantuan Beras untuk Penanganan Bencana Alam Tahun 2023 Rp 25.682.104.000,-dan 2) Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahun 2023
5	Kanwil	DIPA 25 Maret 2025	366.382.625.000	310.243.795.000	56.138.830.000	160.900.114.000	Revisi Hal III DIPA

Untuk mengetahui target penyerapan anggaran dapat dilihat pada lampiran 4. Rencanan Penarikan Dana.

BAB IV
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025, terdapat 5 (lima) Indikator Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional yang menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional.
2. Pada Triwulan I capaian IKSS yang bisa dihitung IKSS Inflasi Harga Bergejolak, sedangkan emapt (4) IKSS capaiannya pada triwulan IV/akhir tahun.
3. Capaian IKSS Inflasi Harga bergejolak sebesar 0,37% dari target 3-5.
4. Realisasi anggaran Badan Pangan Nasional pada triwulan I tahun 2025 sebesar Rp **9.950.215.598 atau (**2,72%) dari pagu Rp**366.382.625.000,** rendah realisasi ini karena adanya revisi DIPA atas kebijakan efisiensi anggaran dan adanya anggaran bantuan pangan tahun 2024 yang belum terbayarkan.

B. Tindak Lanjut/Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan capaian kinerja triwulan selanjutnya, Badan Pangan Nasional akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan di lingkungan Badan Pangan Nasional.
2. Membuat jadwal dan memetakan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan program dan anggaran pada triwulan II.
3. Melakukan koordinasi secara intensif ke Kementerian Keuangan dan instansi terkait, agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai target.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025

BADAN PANGAN NASIONAL (***NATIONAL FOOD AGENCY***)

Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550

Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367

Faksimili (021) 7802619; Website: http://badanpangan.go.id/;

Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arief Prasetyo Adi

Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2025

Kepala Badan Pangan Nasional

Arief Prasetyo Adi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PANGAN NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga Pangan	1.1 Inflasi Harga Bergejolak	3-5	%
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	2.1. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / *Food Insecurity Experience Scale* (FIES)	3,75	%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	3.1. Skor PPH konsumsi	94	Skor
4	Meningkatnya penjaminan keamanan pangan	4.1. Indeks keamanan pangan Segar	61	%
5	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	5.1. Nilai RB	81	Nilai

	Nama Program	Anggaran (Rp.)
125.01.HA.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	212.893.458.000
125.01.WA.	Program Dukungan Manajemen	117.063.827.000
Total		329.957.285.000

Jakarta, 2 Januari 2025

Kepala Badan Pangan Nasional

Arief Prasetyo Adi

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Hasil Revis Tahun 2025

BADAN PANGAN NASIONAL

BADAN PANGAN NASIONAL (*NATIONAL FOOD AGENCY*)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: http://badanpangan.go.id/
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Arief Prasetyo Adi**

Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 25 Maret 2025
Kepala Badan Pangan Nasional

Arief Prasetyo Adi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PANGAN NASIONAL
(REVISI-1)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan	1.1 Inflasi Harga Bergejolak	3-5	%
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	2.1. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / *Food Insecurity Experience Scale* (FIES)	3,75	%
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	3.1. Skor PPH konsumsi	94	Skor
4	Meningkatnya penjaminan keamanan pangan	4.1. Indeks keamanan pangan Segar	61	%
5	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	5.1. Nilai RB	81	Nilai

Nama Program	Anggaran (Rp.)
125.01.HA. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	249.318.798.000
125.01.WA. Program Dukungan Manajemen	117.063.827.000
Total	**366.382.625.000**

Jakarta, 25 Maret 2025
Kepala Badan Pangan Nasional

Arief Prasetyo Adi

Lampiran 3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja			Kode RO	Nama RO	Target Tahun 2025 (DIPA Awal)		
							Jumlah	Satuan	Lokasi			Fisik (satuan)	Anggaran Pusat (Rp)	Anggaran Dekonsentrasi (Rp)
				HA	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**								**158.654.628.000**	**54.238.830.000**
				HA.6875	**Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**								**64.792.789.000**	**23.128.290.000**
SS1. Terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan	IKSS1. Inflasi Harga Bergejolak (target Tahun 2025 = 3-5%)	SP1. Terpenuhinya ketersediaan pangan	IKSP1. Skor PPH ketersediaan (target Tahun 2025 = skor 97,3)		SK1. Tersedianya ketersediaan dan kebutuhan pangan	IKSK1. Rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan	113	%	Pusat dan Satker Dekonsentrasi	PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	40	1.851.205.000	5.010.840.000
									Pusat	AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	6	3.232.364.000	-
									Pusat	AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	6	600.000.000	-
									Pusat	QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	4	5.486.346.000	-
			IKSP2. Rasio penyediaan cadangan pangan dalam negeri terhadap target cadangan pangan (target Tahun 2025 = 25%)		SK2. Tersedia dan terkelolanya cadangan pangan	IKSK2. Rasio pemenuhan cadangan pangan terhadap target	50	%	Pusat	PBR.003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	6	4.000.000.000	-
						IKSK3. Jumlah pengelolaan cadangan beras pemerintah	1,5-3	juta ton	Pusat dan Satker Dekonsentrasi	AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	39	10.763.150.000	5.864.450.000
						IKSK4. Rasio jumlah cadangan pangan yang dikelola oleh Lumbung Pangan Masyarakat	50	%	Pusat	AFA.003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	14	2.000.000.000	-
									Pusat dan Satker Dekonsentrasi	QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	34	1.000.000.000	2.700.000.000
									Pusat	RAG.001	Sarana Logistik Pangan	4	7.000.000.000	-
		SP2. Terjaganya harga pangan antar wilayah antar waktu	IKSP3. Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan komulatif komoditas pangan pokok antar		SK3. Terkendalinya harga pangan di tingkat produsen dan konsumen	IKSK5. Rasio perubahan harga di tingkat produsen dan konsumen	20-25	%	Pusat	PBR.002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12	3.180.000.000	-

			waktu dan antar wilayah (target Tahun 2025 = 20-25%)			terhadap HPP/HET/HAP								
									Pusat dan Satker Dekonsentrasi	AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1	2.107.919.000	9.553.000.000
									Pusat	AFA.002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	10	951.500.000	-
									Pusat	QDD.001	Pangan yang Terdistribusi	50	1.000.000.000	-
									Pusat	QDD.002	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	39	2.750.000.000	-
									Pusat	QDD.003	Kios Pangan yang dikembangkan	1	500.000.000	-
									Pusat	QMA.002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12	15.370.305.000	-
									Pusat	RAG.002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3	3.000.000.000	-
				HA.6876	**Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi**								**53.577.000.000**	**3.260.000.000**
SS2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	IKSS2. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES) (target Tahun 2025 = 3,75%)	SP3. Menurunnya daerah rentan rawan pangan	IKSP4. Persentase daerah rentan rawan pangan (target 2025 = 16,7%)		SK4. Tersedianya rekomendasi kebijakan kerawanan pangan	IKSK6. Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan wilayah	100	%	Pusat dan Satker Dekonsentrasi	ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	39	1.600.000.000	1.900.000.000
									Pusat	AEA.001	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	1	3.981.760.000	-
									Pusat	AFA.001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	4	400.000.000	-
									Pusat	QMA.001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1	1.000.000.000	-
					SK5. Termanfaatkannya bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	IKSK7. Rasio pemanfaatan bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	100	%	Pusat	QEC.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	64.800	18.400.000.000	-

						IKSK8. Persentase penerima bantuan beras fortifikasi bagi masyarakat rawan pangan	0.5-1	%	Pusat	QEC.103	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	1.944	583.200.000	-
					SK6. Termanfaatkannya pangan yang diselamatkan	IKSK9. Rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan	80	%	Pusat	PBR.004	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	5	4.710.259.000	-
									Pusat dan Satker Dekonsentrasi	AEA.003	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	18	7.032.040.000	1.360.000.000
									Pusat	QMA.003	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	1	7.000.000.000	-
									Pusat	QMA.004	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	1	888.143.000	-
									Pusat	RAG.001	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	15	7.541.598.000	-
		SP4. Meningkatnya Penyelamatan Pangan	IKSP5. Persentase pangan yang terselamatkan (target 2025 = 3,0-5,0%)						Pusat	PAD.001	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	1	440.000.000	-
				HA.6877	**Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**								**40.284.839.000**	**27.850.540.000**
SS3. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	IKSS 3. Skor PPH konsumsi (target Tahun 2025 = skor 94)	SP5. Meningkatnya konsumsi pangan sesuai target yang direkomendasikan	IKSP6. Persentase peningkatan Konsumsi sayur dan buah (target Tahun 2025 = 1,00%)		SK7. Tercapainya tingkat konsumsi sayur dan buah	IKSK10. Konsumsi sayur dan buah	245,33	Gr/kap/hari	Pusat	AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	10	7.860.000.000	-
									Pusat dan Satker Dekonsentrasi	PEH.001	Promosi Pangan B2SA	39	3.500.000.000	6.840.000.000
			IKSP 7. Persentase peningkatan Konsumsi umbi-umbian (target Tahun 2025 = 5,00%)		SK8. Tercapainya tingkat konsumsi umbi-umbian	IKSK11. Konsumsi umbi-umbian	53,4	Gr/kap/hari	Pusat dan Satker Dekonsentrasi	QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	101	684.460.000	8.515.540.000
									Pusat	AFA.001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	3	600.000.000	-

			IKSP 8. Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani (target Tahun 2025 = 2,00%)		SK9. Tercapainya tingkat konsumsi pangan hewani	IKSK12. Konsumsi Pangan Hewani	129,11	Gr/kap/hari	Pusat	BDG.001	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	10	2.000.000.000	-
									Pusat	QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	1	1.500.000.000	-
SS4. Meningkatnya penjaminan keamanan pangan	IKSS 4. Indeks keamanan pangan Segar (target Tahun 2025 = 61%)	SP6. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	IKSP9. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (target Tahun 2025 = 91%)		SK10. Termanfaatkannya standar keamanan dan mutu pangan segar	IKSK13. Persentase pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	42,5	%	Pusat	QDB.002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	246	1.499.760.000	-
					SK11. Meningkatnya kelembagaan keamanan dan mutu pangan yang terstandarisasi	IKSK14. Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi	67,1	%	Pusat dan Satker Dekonsentrasi	ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	9	1.243.760.000	-
									Pusat	AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	9	4.628.480.000	2.128.000.000
									Pusat	AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	5	1.000.000.000	-
					SK12. Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan	IKSK15. Persentase produk pangan aman di peredaran	91	%	Pusat	AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	3	4.860.650.000	-

									Pusat	AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	3	300.000.000	-
									Pusat	RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4	4.205.000.000	-
									Pusat dan Satker Dekonsentrasi	QIA.002	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	39	2.998.000.000	3.800.000.000
						IKSK16. Persentase waktu perizinan yang diterbitkan sesuai standar	78	%	Pusat dan Satker Dekonsentrasi	PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.400	2.500.000.000	5.400.000.000
									Pusat dan Satker Dekonsentrasi	QDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	19	904.729.000	1.167.000.000
				WA	**Program Dukungan Manajemen**								**117.063.827.000**	**0**
				WA.6874	**Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional**								**117.063.827.000**	**0**
SS5. Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	IKSS5. Nilai RB (target Tahun 2025 = nilai 81)	SP7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi	IKSP10. Nilai SAKIP (target Tahun 2025 = nilai 65)		SK13. Terwujudnya Tata Kelola Perencanaan yang baik	IKSK17. Indeks Perencanaan Pembangunan	83	indeks	Pusat	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	12	6.129.682.000	
									Pusat	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	1.000.000.000	-
					SK14. Terpenuhinya Layanan Kerjasama Bidang Pangan	IKSK18. Persentase Tersusunnya Kerja Sama Bidang Pangan	100	%	Pusat	AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	1	1.224.972.000	-
					SK15. Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang Prima	IKSK19. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik (Skala Likert (1-4))	3,62	nilai	Pusat	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	6	2.899.500.000	-
			IKSP11. Opini BPK (target Tahun 2025 = predikat WTP)		SK16. Terwujudnya pengelolaan Organisasi, SDM dan Layanan Hukum yang baik	IKSK20. Peringkat komposit evaluasi kelembagaan	90,00	nilai	Pusat	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	1.934.000.000	
						IKSK21. Indeks sistem merit	250,00	nilai	Pusat	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	396	1.887.686.000	

						IKSK22. Indeks reformasi hukum	91	nilai	Pusat	EBA.957	Layanan Hukum	1	1.141.900.000	-
									Pusat	PAD.001	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	1	440.000.000	-
					SK17. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pengadaan dan layanan Umum yang baik	IKSK23. IKPA	94,00	nilai	Pusat	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	1.945.500.000	-
						IKSK24. Indeks Pengelolaan Aset	2,25	indeks	Pusat	EBB.951	Layanan Sarana Internal	81	2.313.304.000	-
						IKSK25. Indeks tata Kelola pengadaan	52,54	nilai	Pusat	EBA.956	Layanan BMN	4	525.011.000	-
						IKSK26. Indeks Kepuasan Layanan Keuangan Pengadaan dan Umum (Skala Likert (1-5))	3,40	nilai	Pusat	EBA.962	Layanan Umum	1	8.348.720.000	-
									Pusat	EBA.959	Layanan Protokoler	1	792.600.000	-
									Pusat	EBA.994	Layanan Perkantoran	1	79.057.285.000	-
					SK18. Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan	IKSK27. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4,00	indeks	Pusat	QMA.001	Data dan Informasi Pangan	1	3.669.863.000	-
						IKSK28. Indeks EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral)	3,00	indeks	Pusat	UAB.001	Sistem Informasi Pangan dan Gizi Terintegrasi	1	500.000.000	-
					SK19. Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional	IKSK29. Tingkat Maturitas SPIP	3	level	Pusat	EBD.965	Layanan Audit Internal	24	3.253.804.000	-
Jumlah Anggaran (Pusat dan Dekonsentrasi)													**275.718.455.000**	**54.238.830.000**
Pagu Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (DIPA Terbit Tanggal 2 Desember 2024)													**329.957.285.000**	

Lampiran 4. RENCANA AKSI DAN RENCANA PENARIKAN DANA BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	KOMPONEN	VOLUME	ALOKASI	RENCANA PENARIKAN DANA			
								TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas							**212.893.458.000**	**42.578.691.600**	**42.578.691.600**	**63.868.037.400**	**63.868.037.400**
1	**Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Stabilisasi Pasokan danHarga Pangan**	**A. Direktorat Ketersediaan Pangan**					**16.180.755.000**	**3.236.151.000**	**3.236.151.000**	**4.854.226.500**	**4.854.226.500**
		1. Penyusunan proyeksi neraca pangan 2. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah 3. Pengendalian Impor dan Ekspor Pangan 4. Koordinasi dengan K/L terkait dan pelaku usaha 5. Pemantauan ketersediaan pangan 6. Penguatan regulasi di bidang ketersediaan pangan 7. Penyusunan neraca bahan makanan 8. Pemantauan Ketersediaan Pangan 9. Peningkatan pemanfaatan pangan 10. Program bantuan pangan telur dan daging ayam 11. Program bantuan pangan beras	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	40 rekomendasi kebijakan	6.862.045.000	1.372.409.000	1.372.409.000	2.058.613.500	2.058.613.500
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	6 kegiatan	3.232.364.000	646.472.800	646.472.800	969.709.200	969.709.200
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Ketersediaan Pangan	Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan	6 NSPK	600.000.000	120.000.000	120.000.000	180.000.000	180.000.000
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	4 data	5.486.346.000	1.097.269.200	1.097.269.200	1.645.903.800	1.645.903.800

		B. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					**38.412.724.000**	**7.682.544.800**	**7.682.544.800**	**11.523.817.200**	**11.523.817.200**
		1. Pemantauan pasokan dan harga pangan 2. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan beras 3. Stabilisasi harga pangan ditingkat produsen melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) 4. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jagung 5. Pemantauan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen 6. Pengendalian Inflasi Pusat dan daerah 8. Penerbitan Regulasi HPP dan HAP 7. Koordinasi dengan K/L terkait dan pelaku usaha 10. Gerakan Pangan Murah (GPM) 9. Penerbitan regulasi HAP/HET	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12 rekomendasi kebijakan	3.180.000.000	636.000.000	636.000.000	954.000.000	954.000.000
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1 kegiatan	2.107.919.000	421.583.800	421.583.800	632.375.700	632.375.700
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	10 NSPK	951.500.000	190.300.000	190.300.000	285.450.000	285.450.000
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12 data	15.370.305.000	3.074.061.000	3.074.061.000	4.611.091.500	4.611.091.500
			Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Pangan yang Terdistribusi	Fasilitasi Distribusi Pangan	50 Kelompok Masyarakat	1.000.000.000	200.000.000	200.000.000	300.000.000	300.000.000
				Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	Pelaksanaan GPM	39 Kelompok Masyarakat	12.303.000.000	2.460.600.000	2.460.600.000	3.690.900.000	3.690.900.000
				Kios Pangan yang dikembangkan	Pengembangan Kios Pangan	1 Kelompok Masyarakat	500.000.000	100.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000
			Sarana bidang pertanian, kehutanan lingkungan hidup	Sarana stabilisasi pasokan dan harga pangan	Sarana stabilisasi pasokan dan harga pangan	3 unit	3.000.000.000	600.000.000	600.000.000	900.000.000	900.000.000
		C. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan					**33.327.600.000**	**6.665.520.000**	**6.665.520.000**	**9.998.280.000**	**9.998.280.000**
		1. Analisis kebijakan ekspor dan impor pangan 2. Penguatan cadangan pangan nasional 3. Penguatan logistik nasional dan wilayah	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	6 rekomendasi kebijakan	4.000.000.000	800.000.000	800.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi	39 kegiatan	16.627.600.000	3.325.520.000	3.325.520.000	4.988.280.000	4.988.280.000

		(sarana dan prasarana alat pendingin untuk memperpanjang masa simpan dan stok pangan) 4. Penguatan regulasi cadangan pangan pemerintah 5. Pemantauan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah		dan Cadangan Pangan	dan Cadangan Pangan					
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	14 NSPK	2.000.000.000	400.000.000	400.000.000	600.000.000	600.000.000
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	34 data	3.700.000.000	740.000.000	740.000.000	1.110.000.000	1.110.000.000
			Sarana bidang pertanian, kehutanan lingkungan hidup	Sarana logistik pangan	Fasilitasi Sarana logistik pangan	4 unit	7.000.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
2	**Pengendalian Kerawanan Pangan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi**	**A. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan**					**27.864.960.000**	**5.572.992.000**	**5.572.992.000**	**8.359.488.000**	**8.359.488.000**
		1. Penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan berupa penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan 2. Aksi Kesiapsiagaan krisis pangan 3. Koordinasi, sosialisasi, bimtek, monev dan pelaporan pengendalian kerawanan pangan 4. Penyusunan NSPK pengendalian	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	39 rekomendasi kebijakan	3.500.000.000	700.000.000	700.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	1 kegiatan	3.981.760.000	796.352.000	796.352.000	1.194.528.000	1.194.528.000
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	4 NSPK	400.000.000	80.000.000	80.000.000	120.000.000	120.000.000
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1 data	1.000.000.000	200.000.000	200.000.000	300.000.000	300.000.000
			Bantuan Produk	Bantuan Pangan terfortifikasi	Penyaluran Bantuan Pangan	1.944 Paket	583.200.000	116.640.000	116.640.000	174.960.000	174.960.000

		kerawanan pangan 5. Intervensi pengendalian kerawanan pangan 6. Penyusunan data dan informasi pengendalian kerawanan pangan 7. Penyusunan bahan komunikasi, informasi dan edukasi		Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	Intervensi pengendalian rawan pangan	64.800 Paket	18.400.000.000	3.680.000.000	3.680.000.000	5.520.000.000	5.520.000.000
		B. Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi					**28.972.040.000**	**5.794.408.000**	**5.794.408.000**	**8.691.612.000**	**8.691.612.000**
		1. Fasilitasi penyusunan sistem peringatan dini kewaspadaan pangan dan gizi 2. Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi 3. Gerakan Penyelamatan Pangan 4. Penguatan regulasi dalam bidang kewaspadaan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	5 rekomendasi kebijakan	4.710.259.000	942.051.800	942.051.800	1.413.077.700	1.413.077.700
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	18 kegiatan	8.392.040.000	1.678.408.000	1.678.408.000	2.517.612.000	2.517.612.000
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	1 Data	7.000.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
				Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	88 data	888.143.000	177.628.600	177.628.600	266.442.900	266.442.900
			Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	Fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	10 Unit	7.541.598.000	1.508.319.600	1.508.319.600	2.262.479.400	2.262.479.400
			Peraturan Presiden	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	Penyusunan RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	1 RPerpres	440.000.000	88.000.000	88.000.000	132.000.000	132.000.000
3		**A. Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan**					**31.500.000.000**	**6.300.000.000**	**6.300.000.000**	**9.450.000.000**	**9.450.000.000**

		1. Penguatan regulasi bidang penganekaragaman pangan 2. Analisis Situasi Konsumsi Pangan 3. Promosi konsumsi pangan B2SA	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekargaman Konsumsi Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	10 kegiatan	7.860.000.000	1.572.000.000	1.572.000.000	2.358.000.000	2.358.000.000
			Promosi	Promosi Pangan B2SA	Promosi Pangan B2SA	39 kegiatan	10.340.000.000	2.068.000.000	2.068.000.000	3.102.000.000	3.102.000.000
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Penganekargaman Konsumsi Pangan	Penyusunan NSPK Penganekargaman Konsumsi Pangan	3 NSPK	600.000.000	120.000.000	120.000.000	180.000.000	180.000.000
			Data dan Informasi Publik	Data Situasi Konsumsi Pangan	Data Situasi Konsumsi Pangan	1 data	1.500.000.000	300.000.000	300.000.000	450.000.000	450.000.000
			Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat yang Terfasilitasi Penganekaragaman Pangan	Rumah Pangan B2SA	101 kelompok	9.200.000.000	1.840.000.000	1.840.000.000	2.760.000.000	2.760.000.000
	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	Pengembangan Usaha Pangan Lokal	10 UMKM	2.000.000.000	400.000.000	400.000.000	600.000.000	600.000.000
		B. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan					**10.500.000.000**	**2.100.000.000**	**2.100.000.000**	**3.150.000.000**	**3.150.000.000**
		1. Penyusunan standar Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan 2. Penilaian dan Pembinaan kelembagaan keamanan dan mutu pangan daerah 3. Kajian dan rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan 4. Harmonisasi Standar Internasional/Regio	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	9 rekomendasi kebijakan	1.243.760.000	248.752.000	248.752.000	373.128.000	373.128.000
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	9 kegiatan	4.628.480.000	925.696.000	925.696.000	1.388.544.000	1.388.544.000
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	5 NSPK	1.000.000.000	200.000.000	200.000.000	300.000.000	300.000.000

		nal Bidang Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan 5. Koordinasi, Advokasi, Sosialisasi dan Coaching Clinic Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar 6. Peningkatan kapasitas pengawas keamanan dan mutu pangan melalui Diklat PPNS, Bimtek dan Pelatihan	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang dibina	246 Lembaga	3.627.760.000	725.552.000	725.552.000	1.088.328.000	1.088.328.000
		C. Direktorat Pengawasan Standar Keamanan dan Mutu Pangan					**26.135.379.000**	**5.227.075.800**	**5.227.075.800**	**7.840.613.700**	**7.840.613.700**
		1. Penguatan regulasi pengawasan standar keamanan dan mutu pangan 2. Serifikasi dan registrasi keamanan dan mutu pangan 3. Pengawasan keamanan dan mutu pangan	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	3 kegiatan	4.860.650.000	972.130.000	972.130.000	1.458.195.000	1.458.195.000
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	3 NSPK	300.000.000	60.000.000	60.000.000	90.000.000	90.000.000
			Perizinan Produk	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Sertifikasi dan registrasi	2400 Produk	7.900.000.000	1.580.000.000	1.580.000.000	2.370.000.000	2.370.000.000
			Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	Fasilitasi sarana keamanan dan mutu pangan	4 Unit	4.205.000.000	841.000.000	841.000.000	1.261.500.000	1.261.500.000

			Pengawasan dan Pengendalian Produk	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan Dan Mutu Pangan	248 laporan	6.798.000.000	1.359.600.000	1.359.600.000	2.039.400.000	2.039.400.000
			Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	Fasilitasi Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	19 Lembaga	2.071.729.000	414.345.800	414.345.800	621.518.700	621.518.700
Program Dukungan Manajemen							**117.063.827.000**	**23.412.765.400**	**23.412.765.400**	**35.119.148.100**	**35.119.148.100**
4.	**Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya**	**A. Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas**					**11.254.154.000**	**2.250.830.800**	**2.250.830.800**	**3.376.246.200**	**3.376.246.200**
		1. Penguatan akuntabilitas kinerja program dan anggaran 2. Penguatan Kerjasama bidang pangan 3. Pengelolaan kehumasan dan informasi publik	Kerja Sama	Kerja Sama Bidang Pangan	Kerja Sama Bidang Pangan	1 dokumen	1.224.972.000	244.994.400	244.994.400	367.491.600	367.491.600
			Layanan Dukungan Manajemen InternaL	Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan Hubungan Masyarakat	6 layanan	2.899.500.000	579.900.000	579.900.000	869.850.000	869.850.000
			Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	12 dokumen	6.129.682.000	1.225.936.400	1.225.936.400	1.838.904.600	1.838.904.600
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 dokumen	1.000.000.000	200.000.000	200.000.000	300.000.000	300.000.000
		B. Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum					**92.982.420.000**	**18.596.484.000**	**18.596.484.000**	**27.894.726.000**	**27.894.726.000**
		1. Pengelolaan BMN 2. Penyediaan layanan protokoler 3. Penyediaan layanan umum 4. Pengelolaan administrasi perkantoran 5. Pengelolaan manajemen keuangan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	Layanan BMN dan Pengadaan	4 layanan	525.011.000	105.002.200	105.002.200	157.503.300	157.503.300
				Layanan Protokoler	Layanan Protokoler	1 layanan	792.600.000	158.520.000	158.520.000	237.780.000	237.780.000
				Layanan Umum	Layanan Umum	1 layanan	8.348.720.000	1.669.744.000	1.669.744.000	2.504.616.000	2.504.616.000
				Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	1 layanan	62.254.305.000	12.450.861.000	12.450.861.000	18.676.291.500	18.676.291.500
					Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 layanan	16.802.980.000	3.360.596.000	3.360.596.000	5.040.894.000	5.040.894.000
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal	81 unit	2.313.304.000	462.660.800	462.660.800	693.991.200	693.991.200

		Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan Manajemen Keuangan	1 dokumen	1.945.500.000	389.100.000	389.100.000	583.650.000	583.650.000
C. Biro Organisasi, Sumberdaya Manusia dan Hukum						**5.403.586.000**	**1.080.717.200**	**1.080.717.200**	**1.621.075.800**	**1.621.075.800**
1. Peningkatan kapasiatas sumberdaya manusia 2. Pengelolaan organisasi dan tata laksana 3. Penyediaan layanan hukum		Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hukum	Layanan Hukum	1 layanan	1.141.900.000	228.380.000	228.380.000	342.570.000	342.570.000
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 layanan	1.934.000.000	386.800.000	386.800.000	580.200.000	580.200.000
		Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	Layanan Manajemen SDM Internal	396 orang	1.887.686.000	377.537.200	377.537.200	566.305.800	566.305.800
		Peraturan Presiden	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	Penyusunan RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	1 Rperpres	440.000.000	88.000.000	88.000.000	132.000.000	132.000.000
D. Pusat Data dan Informasi Pangan						**4.169.863.000**	**833.972.600**	**833.972.600**	**1.250.958.900**	**1.250.958.900**
1. Penyediaan layanan data dan informasi pangan melalui penguatan sistem jaringan dan informasi 2. Pengelolaan data dan informasi pangan 3. Tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik		Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	Data dan Informasi Pangan	1 layanan	3.669.863.000	733.972.600	733.972.600	1.100.958.900	1.100.958.900
		Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	1 Sistem Informasi	500.000.000	100.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000
E. Inspektorat						**3.253.804.000**	**650.760.800**	**650.760.800**	**976.141.200**	**976.141.200**
1. Pengawasan dan pengendalian		Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Audit Internal	Layanan Audit Internal	24 Laporan	3.253.804.000	650.760.800	650.760.800	976.141.200	976.141.200
Total Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025						**329.957.285.000**	**65.991.457.000**	**65.991.457.000**	**98.987.185.500**	**98.987.185.500**